

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 DI KABUPATEN KEEROM

Eyal Philips Reyaan
Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kabupaten Keerom”, penelitian ini bertujuan untuk Untuk Mengetahui penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepala daerah Tahun 2020 di Kabupaten Keerom dan Untuk mengetahui Kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Keerom.

Dalam penelitian ini menggunakan Tipe Penelitian Normatif Empiris dimana tipe penelitian ini mengkaji permasalahan tentang penanganan tindak pidana pemilihan kepala daerah tahun 2020 Di kabupaten keerom.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Keerom yaitu penanganan dalam permasalahan Tindak pidana Terkait dengan tindak pidana pilkada ini, belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya penanganan Tindak Pidana Pilkada 2020 di kabupaten Keerom yaitu adanya 1 (satu) laporan dan 1 (satu) temuan yang telah diproses dalam penanganan pilkada tersebut..

Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Keerom yaitu pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 berlangsung dengan baik walaupun dilaksanakan dimasa Pandemi covid 19. Kendala-kendala yang dihadapi anatara lain alam, menyaluran logistik pilkada yang terhambat. Mulai dari terlambat karena cuaca ataupun masalah adanya kerusakan yang membuat logistik sulit terdistribusi. Adanya masalah-masalah ketidakpahaman penyelenggara pemilu dan pemilih. Masalah penerapan protokol kesehatan juga sempat menjadi kendala pelaksanaan pilkada. Kendala lain yaitu dugaan pelanggaran tidak dapat diproses karena terbentur regulasi atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dimaksud. Kendala lain yang masih ditemukana adalah angka temuan yang artinya partisipasi masyarakat masih sangat rendah, Tantangan lainnya, antara lain waktu penanganan pelanggaran pidana yang sangat singkat dibandingkan dengan pemilu.

Kata kunci : Penanganan, Tindak Pidana, Pilkada, Kabupaten Keerom

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Pers, Jakarta
- Agus bastoni, 2002, *Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum RI No 22 Th.2017* , Sinar Grafika, Jakarta,
- Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rienka Cipta, Jakarta
- Andi Zainal Abidin, 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta
- Chairul Huda, 2013, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menjadi Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta
- Diah Purnamasari, 2015, *Amandemen Undang-Undang Pilkada* , Sinar Grafika, Jakarta,
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Eni Suharti, 2002, *Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum RI No 15 Th.2011* , Sinar Grafika, Jakarta
- Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada , Depok.
- Gotridus Goris Seren, 2003, *Kamus Pemilu Populer*, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Hamdan Zoelva, 2013, *Jurnal Konstitusi*, Jakarta : MK
- Kadir Souyb, 2003, *Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD*, Lembaga Informasi Nasional, Jakarta

Kumiawan Eka Saputra, 2007, *kumpulan surat keputusan kpu, kpu kota lubuk linggau*, Lubuk Linggau

Kancil, 2005, *Pemilihan Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah* (Jakarta : Rineka Cipta

Khairuddin Tahmid, 2008, *etralitas Lembaga Peradilan Dalam Penyelesain Sengketa Pemilihan Kepala Daerah*, Jurnal Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung ,Fakta Press

Lamintang, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta

Muri Yusuf, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Kencana, Jakarta.

Pompe Lamintang, 1997, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Grasindo, Jakarta

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016...Op.cit.*, Pasal 148

R.Soersono, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Bandung

Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana 1*, CV Armico : Bandung

Sudarsono, 199, *Kamus Hukum Cetakan Pertama*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Semarang, Yayasan sudarto

Sutrisno Hadi, 1995, *Metode Research*, Jilid 2, Andi Offset, Yogyakarta.

Teguh Prastyo, 2005, *Hukum Pidana Materiil, Jilid II*, Kurnia Kalam : Jogjakarta

Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung

Yusdianto, *Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya*. Jurnal Konstitusi Vol 2 Nomor 2, November 2010

B. Perundang-undangan :

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

C. Internet :

<https://nasional.kompas.com/read/2021/02/02/15200991/kpu-ungkap-kendala-dalam-pelaksanaan-pilkada-2020>